

**EVALUASI INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND  
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM (IPDMIP)  
DI DAERAH IRIGASI SARENG  
KABUPATEN MADIUN**

**Oleh**

Andrian Bagus Kurniawan<sup>1</sup>; Aris Tri Haryanto<sup>2</sup>; Joko Pramono<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Kantor  
Bappeda Kabupaten Madiun, andrianbagus86@gmail.com.

<sup>2</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
aristh68@gmail.com.

<sup>3</sup> Program Studi S2 MAP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta,  
masjepe69@gmail.com.

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Program IPDMIP di Daerah Irigasi Sareng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran evaluasi IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*) di Daerah Irigasi Sareng Kabupaten Madiun secara objektif. Metode yang digunakan dalam menentukan sumber data adalah metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn pada program IPDMIP yaitu kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan telah terlaksana keseluruhan di Daerah Irigasi Sareng. Efektifitas program telah dirasakan oleh semua pihak pelaksana. Efisiensi juga telah dilaksanakan oleh berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Kecukupan, perataan, responsifitas dan ketepatan juga telah dirasakan oleh kelompok sasaran dari program ini, yaitu kelompok petani pengguna air. Oleh karena itu, melalui pelaksanaan evaluasi dari hasil analisis tersebut, Program IPDMIP ini dapat dilaksanakan kembali di masa mendatang, sehingga dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan produktifitas pertanian secara terus menerus.

*Keywords* : Evaluasi, IPDMIP, William N. Dunn

**Pendahuluan**

FAO (*Food and Agriculture Organization*) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 1985 berbagai usaha pemerintah digerakkan pada masa orde baru di masa pemerintahan Soeharto disebut dengan revolusi hijau atau yang lebih dikenal dengan “Panca Usaha Tani” untuk meningkatkan hasil panen petani. Perekonomian Indonesia dari sektor pertanian akan membuat

Indonesia akan terus maju mengingat sebagian besar penduduk di Indonesia bermata pencarian sebagai petani, karena pertanian memegang beberapa hal penting dalam suatu Negara yaitu di bidang pangan, bahan pokok industri, sandang papan dan berfungsi juga untuk menyerap tenaga kerja sebagian masyarakat.

Program IPDMIP (*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program*)

merupakan salah satu dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) tahun 2005-2025, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sasaran di atas, maka arah Kebijakan Umum Ketahanan Pangan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, ketahanan sumber daya air dan ketahanan pangan menjadi prioritas.

*Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* merupakan program pemerintah di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada beras sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan Modul Kelembagaan Pengelola Irigasi yang disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2019, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) terdiri dari tiga unsur kelembagaan, yaitu

1. kelembagaan instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi maupun unsur pemerintah kabupaten/kota yang membidangi irigasi,
2. kelembagaan perkumpulan petani pemakai air, baik P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai

Air), maupun IP3A (Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air) dan

3. kelembagaan Komisi Irigasi (Komir), baik Komisi Irigasi provinsi, Komisi Irigasi antar provinsi, dan Komisi Irigasi kabupaten/kota.

Sektor pertanian masih menjadi peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada pedesaan. Kelompok tani merupakan salah wadah untuk dilaksanakannya Sekolah Lapang, saling belajar, dan dengan hal tersebut diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat dari yang tidak peka terhadap perkembangan teknologi menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan teknologi yang akan sangat berdampak meningkatkan produktivitas pertanian yang mampu menyesuaikan dengan Cakupan wilayah program IPDMIP adalah di 74 Kabupaten di dalam 16 Provinsi di Indonesia, untuk periode tahun 2017 – 2021. Cakupan program IPDMIP adalah mendukung upaya penguatan kapasitas kelembagaan SDA, pengelola irigasi dan kapasitas pemerintah dalam melaksanakan operasi dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem irigasi

Kegiatan IPDMIP di Kab Madiun dilaksanakan mulai tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2021, yang meliputi DI Sareng, DI Sedah, DI Craken, DI Kawung dan DI Ketupu. Daerah Irigasi Sareng merupakan daerah irigasi kewenangan Kabupaten Madiun yang berada di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab Madiun dengan luas layanan 866 Ha. Hasil dari pelaksanaan program ini, dapat dilihat dari hasil produksi pertanian yang relative meningkat

dari tahun ke tahun. Dapat kita lihat dalam tabel berikut :

**Tabel 1** Produksi pertanian padi di Kabupaten Madiun Tahun 2019-2021

Jenis Padi	Hasil Produksi (Ton)		
	2019	2020	2021
Padi Sawah	547.418,42	597.068,60	573.113,76
Padi Ladang	16.876,66	20.414,96	42.124,49

Pelaksanaan kegiatan IPDMIP di daerah Irigasi Sareng meliputi kegiatan peningkatan kelembagaan petani, kegiatan Sekolah Lapang (SL) dan rehabilitasi fisik daerah irigasi Sareng yang dilaksanakan oleh Bappeda Kab Madiun, Dinas Pertanian dan Perikanan kab Madiun dan Dinas PUPR Kab Madiun.

Menurut Salusu (1998 : 104) :“Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif–motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Pelaksanaan program IPDMIP di Daerah Irigasi Sareng, selain dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, juga melibatkan langsung masyarakat yang dalam hal ini adalah petani. Petani yang ada di Daerah Irigasi tergabung dalam GHIPPA (Gabungan Himpuan Petani Pemakai Air) Daerah Irigasi Sareng didirikan pada tahun 1998. Hal yang melandasi berdirinya GHIPPA adalah untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani

pada usaha pertaniannya. GHIPPA merupakan gabungan beberapa kelembagaan HIPPA yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.

Dengan adanya program IPDMIP penyuluhan pertanian dilakukan dengan menerapkan metode Sekolah Lapang (SL) untuk para petani di Daerah Irigasi Sareng. Sekolah lapang dirasa sangat efektif untuk pembelajaran non formal bagi petani dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dan mengenali potensi, menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya sehingga usaha tani lebih efisien berproduktifitas tinggi dan berkelanjutan.

Program Sekolah Lapang (SL) pada kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project* (IPDMIP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan mendorong petani menjadi lebih mandiri karena tujuan utamanya membangun kemandirian petani dalam pengelolaan proses pembelajaran dari oleh dan untuk petani. Kegiatan ini terdiri dari Sekolah Lapang I dan Sekolah Lapang II yang mengacu siklus musim penghujan dan musim kemarau.

Sekolah lapang dilakukan secara partisipatif dengan metode ceramah 30 persen sisanya adalah simulasi, praktek, diskusi kelompok di lokasi demplot atau laboratorium lapang. Pendidikan petani melalui Sekolah lapang diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya tanaman pangan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dari data jumlah HIPPA/GHIPPA di daerah irigasi Sareng, keseluruhan kelompok sudah mendapatkan Sekolah Lapang. Sementara dari jumlah petani, 11 % petani sudah mendapatkan SL dan sejumlah 89 % petani belum mendapatkan SL. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pengolahan pertanian antar kelompok HIPPA/GHIPPA. Sampai sekarang, setelah kegiatan IPDMIP telah berakhir, kecemburuan antar kelompok tersebut semakin besar.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan IPDMIP di Daerah Irigasi Sareng juga melaksanakan rehabilitasi fisik Daerah Irigasi Sareng yang meliputi rehabilitasi saluran irigasi primer dan tersier, serta normalisasi saluran irigasi yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Madiun. Dengan semakin lancar aliran air untuk irigasi, maka jangkauan pelayanan Daerah Irigasi Sareng menjadi lebih luas cakupannya.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.14/PRT/M/2015, Menyebutkan bahwa jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Ada

beberapa jenis jaringan irigasi yaitu:

1. Jaringan Irigasi Primer adalah jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
2. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
3. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan Irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarer, serta bangunan pelengkap. Pengklasifikasian sistem irigasi ditinjau dari sudut pengelolaannya dapat dibagi mejadi dua, yaitu irigasi pedesaan dan irigasi pekerjaan umum (PU) atau negara. Sebelum adanya kegiatan IPDMIP, Daerah Irigasi Sareng hanya mampu menyuplai air irigasi kisaran 55% dari rencana intake. Sesudah adanya rehabilitasi, Daerah Irigasi Sareng mampu menyupali air irigasi kisaran 85% dari rencana intake.

Dengan adanya rehabilitasi pada daerah irigasi Sareng sangat berdampak positif, yakni semakin mudahnya pengaturan air serta meningkatnya kefungsiannya jaringan pada daerah irigasi Sareng, sehingga debit air yang masuk ke jaringan lebih stabil, mengalami peningkatan volume debit air dan potensi

kehilangan air sudah semakin menurun.

Dari beberapa gambaran diatas, mulai dari telah terwujudnya kerjasama yang baik antara petani pemakai air dan organisasi pengelola air di tingkat bawah dengan organisasi pengelola air di tingkat atas (dari petani pengguna air yang tergabung dalam HIPPA/GHIPPA dengan pemerintah daerah, yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang), sampai pada sekolah lapang yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan yang telah dirasakan manfaatnya oleh para petani, Kegiatan IPDMIP ini telah berakhir pelaksanaannya tahun 2021, Daerah Irigasi Sareng tidak lagi menjadi prioritas penanganannya oleh dinas pelaksana di tahun 2022. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas para petani yang ada disana.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004 : 2) program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian program secara umum, dapat diartikan sebagai rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. Sedangkan pengertian program secara khusus biasanya dikaitkan dengan evaluasi yang berarti suatu kesatuan atau unit kegiatan yang merupakan implementasi atau realisasi suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Sebagaimana dikemukakan William N. Dunn (2003 : 28), Evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan

yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.

Lebih lanjut William N. Dunn (2003 : 609) menjelaskan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu (sebagai contoh, 20 persen penyakit kronis pada tahun 1990) telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternative sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan atau pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam nberbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memudahinya kinerja kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu

dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Menurut William N. Dunn (2003 : 611), kriteria untuk evaluasi diterapkan secara restrospektif, yang dijelaskan sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan menggunakan variabel sebagai berikut :

**Tabel 2** Kriteria Evaluasi

NO	TIPE KRITERIA	PERTANYAAN
1	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6	Ketepatan	Apakah hasil yg diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

**Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dengan teknik pengambilan sampel yang bersifat *purposive sampling*. Sumber data primer pada penelitian ini adalah informan yang merupakan unsur internal pelaksana program. Unsur internal pelaksana program adalah seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, mulai dari pemerintah daerah, kelompok masyarakat serta pendamping program.

Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen, dan dokumentasi. Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen pendukung penelitian sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai hal atau variabel, seperti: surat kabar, majalah, prasasti, catatan, transkrip, surat, agenda, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang disusun dalam bentuk pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan secara terstruktur dengan pertanyaan terbuka yang berisi pertanyaan mengenai kriteria evaluasi

pelaksanaan prgram.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara, metode dokumentasi dengan mengkaji surat atau agenda mengenai program, dan metode observasi dengan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Pada penelitian ini teknik analisis data

dengan menggunakan analisis data interaktif yang didukung dengan matriks data penelitian.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang merupakan unsur internal pelaksana program, diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel 3** Hasil Wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kriteria	Pertanyaan	Jawaban
Efisiensi	Apa saja yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Program IPDMIP?	Melaksanakan pembangunan fisik infrastruktur, yang meliputi pembangunan DAM, rehabilitasi saluran primer maupun sekunder dan normalisasi serta penguatan kelembagaan Komir pada awalnya, karena pada tahun 2020 dilanjutkan oleh Bappeda.
Kecukupan	Permasalahan apa yang terjadi sebelum Program ini dilaksanakan dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Kondisi Dam yang rusak parah, jebol, sehingga aliran air irigasi menjadi tidak lancar.
	Permasalahan apa yang terjadi selama Program ini dilaksanakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Pelaksanaan pembangunan dalam waktu yang singkat, mulai dari proses pengadaan pekerjaan sampai pada pelaksanaan mulai Agustus s/d Desember 2020. Agar progress pengerjaan fisik bias terkejar, sering dilaksanakan lembur.
	Permasalahan apa yang terjadi setelah program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Beberapa bagian saluran, terutama saluran sekunder sudah ada yang retak, hal ini berpengaruh terhadap kelancaran distribusi air untuk irigasi. Sementara masih menjadi perencanaan untuk tahun anggaran kedepan.
Ketepatan	Apakah program IPDMIP perlu untuk dilaksanakan kembali?	Perlu, karena beberapa pengerjaan fisik yang membutuhkan anggaran yang besar dan itu diluar kemampuan APBD Kabupaten Madiun, bias terlaksana dengan Program ini.

**Tabel 4** Hasil Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Perikanan

<b>Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Efisiensi	Apa saja yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Program IPDMIP?	Dinas Pertanian telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain Sekolah Lapang, forum berbagi pengalaman, demonstrasi alat pertanian, kunjungan antar desa, review atau monitoring bulanan, penghargaan penyuluh dan petani.
Kecukupan	Permasalahan apa yang terjadi sebelum Program ini dilaksanakan dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Banyaknya hama yang mengganggu produktifitas pertanian. Selain itu juga keterbatasan pengetahuan petani mengenai sistematika pertanian yang baik, karena ilmu pertanian para petani mayoritas masih turun temurun. Yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perikanan adalah pemaksimalan fungsi penyuluh pertanian yang merupakan jembatan antara dinas dengan para petani.
	Permasalahan apa yang terjadi selama Program ini dilaksanakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama pada saat pelaksanaan kegiatan sekolah lapang. Pernah dilakukan daring, tetapi banyak anggota HIPPA yang tidak mengikuti penuh.
	Permasalahan apa yang terjadi setelah program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Belum semua anggota HIPPA/GHIPPA telah mengikuti kegiatan sekolah lapang. Dinas Pertanian dan Perikanan akan melaksanakan Sekolah Lapang kembali dengan anggaran dari APBD Kabupaten Madiun di tahun depan.
Ketepatan	Apakah program IPDMIP perlu untuk dilaksanakan kembali?	Perlu, karena banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan dana APBD Kabupaten Madiun, dapat dicover dengan Program IPDMIP ini.

**Tabel 5** Hasil Wawancara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

<b>Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
Efisiensi	Apa saja yang telah dilakukan Bappeda dalam Program IPDMIP?	Menyusun Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan (PSETK) serta melaksanakan penguatan kelembagaan Komir yang merupakan lanjutan dari Dinas

		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Kecukupan	Permasalahan apa yang terjadi sebelum Program ini dilaksanakan dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Komir yang kurang aktif menyebabkan pelaksanaan kegiatan pertanian menjadi kurang maksimal, sehingga pertumbuhan sektor pertanian menjadi lambat.
	Permasalahan apa yang terjadi selama Program ini dilaksanakan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Tingkat SDM dari anggota yang beragam, menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pemahaman terkait keorganisasian dan pembahasan permasalahan pada saat FGD penyusunan Dokumen PSETK. Untuk dapat lebih memahami anggota HIPPA/GHIPPA, Bappeda melakukan FGD di lokasi langsung, sehingga dapat langsung melihat kondisi lapangan.
	Permasalahan apa yang terjadi setelah program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Belum pernah dilaksanakan monev ke lokasi-lokasi yang menjadi pelaksana program IPDMIP ini. Selanjutnya akan dianggarkan untuk kegiatan monev tersebut.
Ketepatan	Apakah program IPDMIP perlu untuk dilaksanakan kembali?	Perlu sekali, karena mayoritas penduduk Kabupaten Madiun bekerja di sektor pertanian.

**Tabel 6** Hasil Wawancara dengan Tenaga Pendamping Masyarakat

Kriteria	Pertanyaan	Jawaban
Efisiensi	Apa saja yang telah dilakukan Tenaga Pendamping Masyarakat dalam Program IPDMIP?	Mendampingi anggota HIPPA/GHIPPA pada saat melaksanakan FGD penyusunan dokumen PSETK dengan Bappeda, mendampingi dinas yang akan mengadakan penelusuran kondisi lapangan, menyusun laporan kegiatan.
Kecukupan	Permasalahan apa yang terjadi sebelum Program ini dilaksanakan dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Dilapangan sering terjadi kekurangan air dikarenakan distribusi air untuk irigasi kurang. Selama ini pendamping hanya menyampaikan kejadian tersebut pada penyuluh pertanian yang bertugas di lokasi.
	Permasalahan apa yang terjadi selama Program ini dilaksanakan bagaimana	Sulitnya mengadakan pertemuan antar anggota HIPPA, solusinya adalah pada saat pelaksanaan FGD,

	penyelesaian masalah tersebut?	dilanjutkan dengan pertemuan antar anggota HIPPA/GHIPPA yang ada di Daerah Irigasi Sareng.
	Permasalahan apa yang terjadi setelah program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Beberapa titik saluran irigasi yang kemarin dilakukan rehabilitasi sudah rusak. Sebagai tenaga pendamping yang telah selesai tugasnya, hanya bias melaporkan kejadian kerusakan pada penyuluh pertanian.
Ketepatan	Apakah program IPDMIP perlu untuk dilaksanakan kembali?	Perlu, karena banyak manfaat yang dirasakan oleh Anggota HIPPA.

**Tabel 7** Hasil Wawancara dengan Himpunan Petani Pengguna Air

Kriteria	Pertanyaan	Jawaban
Efektifitas	Apakah sejak adanya program ini, petani merasa penghasilannya meningkat?	Meningkat, karena hasil pertanian meningkat dengan lancarnya aliran irigasi dan anggota HIPPA yang semakin baik pola tanamnya.
	Apakah pembangunan irigasi dirasakan petani dapat meningkatkan hasil pertanian?	Benar. Sangat berpengaruh dengan lancarnya aliran irigasi.
	Apakah sekolah lapang dirasakan petani dapat meningkatkan hasil pertanian?	Betul. Anggota HIPPA yang mengikuti Sekolah Lapang jadi mengerti cara bercocok tanam yang baik dan benar, yang kadang ilmu turun temurun tidak dapat dilaksanakan sekarang ini. Selain itu para anggota juga mengetahui hama yang sedang merajalela dan bagaimana mengatasi hama tersebut.
Kecukupan	Permasalahan apa yang terjadi sebelum program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Banyak petani yang merugi akibat panen tidak maksimal, bahkan ada yang gagal panen dikarenakan serangan hama. selain itu juga pernah terjadi rebutan air untuk mengairi sawah dikarenakan air yang tersedia di saluran irigasi sangat minim.
	Permasalahan apa yang terjadi selama program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	Sulitnya memberikan pemahaman Anggota HIPPA dan menyepakati jadwal pertemuan antar Anggota HIPPA dikarenakan kesibukan masing-masing anggota berbeda.
	Permasalahan apa yang	Tidak ada kegiatan lanjutan dari

	terjadi setelah program IPDMIP ini selesai dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut?	dinas untuk melanjutkan program IPDMIP yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani. HIPPA melalui pertemuan Komir menyampaikan permasalahan yang terjadi di wilayah.
Perataan	Apakah pembagian air untuk irigasi dirasakan sudah merata oleh semua anggota HIPPA?	Sudah, karena adanya kesepakatan antar anggota HIPPA mengenai jadwal gilir air.
	Apakah seluruh anggota HIPPA telah mengikuti sekolah lapang?	Belum, dikarenakan pada saat program berlangsung, terjadi pandemi Covid-19.
Responsifitas	Apakah petani merasa ada peningkatan produksi pertanian setelah pelaksanaan Program IPDMIP?	Ada. Rata-rata anggota HIPPA merasa ada peningkatan hasil pertanian.
Ketepatan	Apakah program IPDMIP perlu untuk dilaksanakan kembali?	Perlu sekali, karena program ini dirasa banyak manfaat oleh anggota HIPPA.

Setelah dilakukan wawancara berdasarkan kewenangan menurut kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn, kemudian dilakukan analisa dan pengelompokan yang disandingkan dengan kajian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program IPDMIP, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Efektifitas, sejauh mana program IPDMIP ini dirasakan hasilnya oleh kelompok sasaran; Hasil dari program IPDMIP dirasakan sangat bermanfaat bagi petani pengguna air melalui kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang, yaitu pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi serta kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan, telah menambah pengetahuan tentang
2. Efisiensi, dalam pelaksanaan program IPDMIP di Daerah Irigasi Sareng, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat; Bappeda dalam hal ini berwenang untuk menyusun dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK), Dinas Pekerjaan Umum dan Pemanfaatan Ruang melakukan serangkaian kegiatan pembangunan fisik infastruktur irigasi, mulai dari pembangunan dan perawatan saluran irigasi sekunder, pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bangunan pendukung lainnya, Dinas Pertanian dan Perikanan melaksanakan sekolah lapang, dan petani pengguna air turut serta menjaga kondisi saluran irigasi yang ada dengan cara

kerja bakti normalisasi saluran, melaksanakan pembagian air kepada anggota perkumpulan secara metarata.

3. Kecukupan, dengan pelaksanaan program IPDMIP ini apakah telah menyelesaikan permasalahan yang muncul sebelum program ini ada; Pembangunan dan peningkatan kondisi fisik jaringan irigasi membuat aliran irigasi menjadi lancar dan merata, mengurangi maraknya pencurian air dan pembagian air yang tidak merata melalui penguatan kelembagaan, dan meningkatkan pengetahuan petani dalam memilih bibit unggul yang sesuai dengan kondisi wilayahnya dan bagaimana cara menanggulangi hama yang sering terjadi.
4. Perataan, dampak pelaksanaan program ini telah dirasakan oleh seluruh kelompok tani yang ada di Daerah Irigasi Sareng atau belum; Cakupan pelayanan daerah irigasi meningkat. Selain itu juga pemerataan akses irigasi dapat terlaksana.
5. Responsifitas, dampak yang dirasakan apakah sudah sesuai dengan harapan semua pihak; tujuan dari program ini telah dirasakan oleh semua pihak, baik dari para petani maupun perangkat daerah yang melaksanakan.
6. Ketepatan, dari program IPDMIP ini telah dirasakan benar-benar bermanfaat bagi semua pihak atau belum; Program IPDMIP telah tepat sasaran, dalam artian mengatasi permasalahan yang terjadi selama ini di Daerah Irigasi Sareng. Seperti kurang baiknya kondisi fisik saluran irigasi yang mengakibatkan

distribusi air terganggu, dengan adanya permbangunan dan rehabilitasi saluran irigas, maka distribusi air menjadi menjadi lancar dan merata.

## Penutup

Evaluasi merupakan salah satu langkah penting dalam mengetahui pencapaian tujuan pelaksanaan Program IPDMIP di Daerah Irigasi Sareng. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Program IPDMIP di Daerah Irigasi Sareng dan untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Program IPDMIP di masa yang akan datang. Berdsarakan kriteria evaluasi yang dilakukan terhadap Program IPDMIP dapat kani sampaikan sebagai berikut :

1. Efektifitas, bahwa hasil dari program IPDMIP dirasakan sangat bermanfaat bagi petani pengguna air;
2. Efisiensi, bahwa seluruh anggota Komisi Irigasi yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Perikanan, Bappeda dan HIPPA/GHIPPA telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
3. Kecukupan, bahwa Program IPDMIP ini dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul sebelum, selama maupun setelah adanya program;
4. Perataan, bahwa cakupan pelayanan daerah irigasi telah dirasakan seluruh anggota HIPPA/GHIPPA, akan tetapi Sekolah Lapang baru sebagian yang dapat mengikuti;

5. Responsifitas, bahwa hasil dari pelaksanaan program telah sesuai dengan harapan semua pihak; dan
6. Ketepatan, bahwa Program IPDMIP dirasakan bermanfaat bagi semua pihak pelaksana sehingga dianggap perlu untuk dilaksanakan kembali.

Adapun saran untuk pelaksanaan Program IPDMIP kedepannya apabila dilaksanakan kembali oleh daerah adalah sebagai berikut :

1. Sistem monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan agar hasil pelaksanaan program IPDMIP dapat dipantau dengan lebih baik dan efektif;
2. Komisi Irigasi yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan HIPPA/GHIPPA agar mengadakan pertemuan rutin anggota agar terjalin rasa kekeluargaan dan keberlanjutan system irigasi partisipatif dapat tetap terlaksana;
3. Program kerja HIPPA/GHIPPA yang telah disusun agar tetap dilaksanakan sehingga keberlanjutan program tetap dirasakan oleh anggota; dan
4. Sekolah lapang oleh Dinas Pertanian dan Perikanan dilanjutkan pelaksanaannya hingga menyentuh semua petani anggota HIPPA/GHIPPA.

#### Daftar Pustaka

Apriyanti, A. (2018). *Penerimaan dan Reproduksi Pesan Dakwah Dikalangan Kolektif Grup Ownership dan Audiences Pengajian Salafi*. [https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/70817/MzU5NDYz/Penerimaan-dan-reproduksi-pesan-dakwah-dikalangan-kolektif-grup-](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/70817/MzU5NDYz/Penerimaan-dan-reproduksi-pesan-dakwah-dikalangan-kolektif-grup-ownership-dan-audiences-pengajian-salafi-4.pdf)

[ownership-dan-audiences-pengajian-salafi-4.pdf](https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/70817/MzU5NDYz/Penerimaan-dan-reproduksi-pesan-dakwah-dikalangan-kolektif-grup-ownership-dan-audiences-pengajian-salafi-4.pdf), diakses pada 2 Januari 2023 pukul 10.40.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. (2019). *Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik dan Kelembagaan Daerah Irigasi Sareng*.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. (2019). *Modul Kelembagaan Pengelola Irigasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. [https://simantu.pu.go.id/epel/e dok/d5d9c\\_Modul\\_Kelembagaan\\_Pengelolaan\\_Irigasi.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/e dok/d5d9c_Modul_Kelembagaan_Pengelolaan_Irigasi.pdf), diakses pada 4 Agustus 2022 pukul 10.52.

Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

Rachman, Benny. 2009. "Dinamika kelembagaan pengelolaan air irigasi", <https://media.neliti.com/media/publications/43846-ID-dinamika-kelembagaan-pengelolaan-air-irigasi>, diakses pada 8 April 2022 pukul 10.51.

Rahmatika, Nurisma, 2022, "4 Tahap Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial", <https://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/PNg7190N-4-tahap-analisis-data-kualitatif->

dalam-penelitian-sosial,  
diakses 15 Desember 2022  
pukul 9.20.

Sadana, J., B. Miles, Matthew, &  
Huberman A. Michael. (2014),  
*Qualitative Data Analysis*.  
Washington DC. Sage

Sugiyono (2013), *Metode Penelitian  
Pendidikan : Pendekatan  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D*. Bandung: Alfabeta.

UCEO, 2016, *Metode Pengumpulan  
Data dalam Penelitian*,  
[https://informatika.uc.ac.id/id/  
2016/02/2016-2-18-metode-  
pengumpulan-data-dalam-  
penelitian/](https://informatika.uc.ac.id/id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/), diakses 15  
Desember 2022 pukul 9.20.

Undang-undang Nomor 17 Tahun  
2007 Tentang *RPJPN  
(Rencana Pembangunan  
Jangka Panjang Nasional)  
tahun 2005-2025*.

Undang-undang Nomor 18 Tahun  
2012 Tentang *Pangan*.

Undang-undang Nomor 19 Tahun  
2013 Tentang *Perlindungan  
dan Pemberdayaan*